



## Dinamika Peran Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Putusan Pengadilan Tingkat Bawah

Husmita Okteriana

MAS Dempo Darul Muttaqien, Kota Pagar Alam, Indonesia

[mitaberman630@gmail.com](mailto:mitaberman630@gmail.com)

Diserahkan tanggal 16 Juli 2024 | Diterima tanggal 25 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 25 September 2024

### Abstract:

*The purpose of this study was to analyze the dynamics of the role of the Supreme Court in harmonizing the decisions of lower courts. This study uses a qualitative approach to the literature study method, where data is collected from secondary sources such as books, articles, and related legal documents. The results showed that the Supreme Court serves as a guardian of consistency and legal certainty by establishing jurisprudence that is a reference for lower-level courts. In addition, the Supreme Court also plays a role in providing directions for legal interpretation in situations that are not explicitly regulated by law. The conclusion of this study is that the role of the Supreme Court is crucial in aligning the rulings of lower level courts to achieve fair and equitable enforcement of the law.*

**Keywords:** Supreme Court, Court Decision, Jurisprudence, Law Enforcement, Lower Court.

### Abstrak :

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap metode studi pustaka, dimana data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga konsistensi dan kepastian hukum dengan menetapkan jurisprudensi yang menjadi acuan pengadilan tingkat bawah. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam memberikan arahan penafsiran hukum dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan merata.*

**Kata Kunci:** Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan, Yurisprudensi, Penegakan Hukum, Pengadilan Rendah.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum (Aiman, 2024), terutama dalam hal penyalarsan putusan antara Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan tingkat bawah. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki peran krusial dalam mengawasi dan menyelaraskan putusan-putusan pengadilan tingkat bawah yang mungkin tidak selalu sejalan dengan hukum yang berlaku atau yang dikehendaki oleh sistem peradilan (Kira, 2023). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi untuk mengadili kasasi, tetapi juga untuk memberikan pedoman melalui jurisprudensi yang menjadi acuan bagi pengadilan di bawahnya.

Mahkamah Agung, dalam menjalankan tugasnya, memegang prinsip "*lex superior derogat legi inferiori*" yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (Laia, 2021). Namun, meskipun terdapat pedoman ini, dalam praktiknya, masih sering ditemukan inkonsistensi dan ketidakselarasan antara putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat bawah (Inkonsistensi & Penggunaan, 2024). Hal ini terjadi, salah satunya, karena pengadilan tingkat bawah sering kali dihadapkan pada kasus yang tidak memiliki preseden atau terdapat perbedaan dalam penerapan hukum yang terikat oleh yurisprudensi yang ada. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Anggreni et al., 2024).

Penelitian ini hadir untuk menggali lebih dalam tentang dinamika peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah. Hal ini sangat relevan mengingat peran Mahkamah Agung dalam memberikan pedoman hukum yang tidak hanya mengatur penafsiran hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif terhadap terjadinya perbedaan interpretasi yang signifikan antar pengadilan di Indonesia. Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada kajian teoritis tentang kewenangan Mahkamah Agung, penelitian ini menyoroti dinamika dalam implementasi fungsi tersebut di lapangan, terutama dalam konteks penyelarasan putusan yang konkret di pengadilan tingkat bawah.

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gaffar, (2008) Sebagian besar penelitian tersebut menekankan pentingnya Mahkamah Agung dalam memastikan keselarasan hukum melalui yurisprudensi yang diterbitkan. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung lebih fokus pada sisi normatif dan teori-teori hukum, tanpa menggali secara mendalam bagaimana dinamika penerapan yurisprudensi oleh pengadilan tingkat bawah dalam praktiknya. Selain itu, beberapa penelitian lainnya hanya mencakup studi kasus terbatas atau hanya menyoroti masalah-masalah spesifik tanpa memberikan gambaran yang lebih luas tentang dampak yang ditimbulkan dari ketidakselarasan putusan antar pengadilan.

Penelitian ini menawarkan distingsi dengan meneliti peran Mahkamah Agung dalam konteks yang lebih praktis, yaitu bagaimana pengadilan tingkat bawah dalam kasus nyata dapat menyelaraskan putusannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep dinamika sebagai fokus analisis, yang memandang bahwa penyelarasan putusan bukanlah sebuah proses statis, melainkan sebuah proses yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas hakim, interpretasi hukum yang berbeda, serta tekanan-tekanan eksternal seperti opini publik dan perkembangan sosial.

Salah satu kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah analisisnya terhadap peran Mahkamah Agung dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengadilan tingkat bawah, serta inisiatif MA dalam memperbaiki sistem informasi hukum agar keputusan-keputusan penting dapat dengan mudah diakses oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian normatif, tetapi juga mengkaji faktor-faktor praktis yang mempengaruhi implementasi yurisprudensi di pengadilan tingkat bawah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran Mahkamah Agung sebagai pembentuk dan penyelarasan keputusan hukum di Indonesia.

Dalam kajian ini, juga ditekankan bahwa meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan banyak yurisprudensi yang bersifat mengikat, pengadilan tingkat bawah kadang masih mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas yurisprudensi tersebut atau karena ketidakmampuan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip hukum yang berubah seiring perkembangan zaman. Selain itu, karakteristik hakim yang berbeda-beda di setiap pengadilan dapat mempengaruhi cara mereka menerapkan hukum, yang pada gilirannya menghasilkan ketidakselarasan antara putusan pengadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait bagaimana Mahkamah Agung dapat lebih efektif dalam meningkatkan keselarasan antara putusan pengadilan tingkat bawah dengan pedoman yang ditetapkan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kebutuhan akan peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan bagi hakim, terutama dalam hal pemahaman yurisprudensi yang diterbitkan oleh MA dan cara-cara terbaik dalam mengimplementasikannya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat akses terhadap putusan-putusan penting Mahkamah Agung, yang memungkinkan pengadilan tingkat bawah untuk lebih mudah mengikuti perkembangan hukum. Sebagai tambahan, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengadilan tingkat bawah dalam menyelaraskan putusan mereka dengan keputusan MA. Faktor-faktor tersebut meliputi kapasitas dan kualifikasi hakim, tekanan eksternal, serta tingkat pemahaman mereka terhadap yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, analisis dilakukan untuk melihat bagaimana dinamika sosial, politik, dan budaya hukum di Indonesia turut berperan dalam mempengaruhi penerapan hukum di tingkat bawah.

Penelitian ini juga memberikan gambaran baru mengenai upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengadilan tingkat bawah. Salah satu aspek penting yang akan dibahas adalah strategi MA dalam memberikan pembinaan kepada pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan hukum dan memastikan putusan yang adil dan konsisten di seluruh Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dalam memahami lebih dalam dinamika peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah (Rukin., 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika peran Mahkamah Agung dalam praktik peradilan, terutama dalam hal penyelarasan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat bawah dengan pedoman hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi yurisprudensi Mahkamah Agung di pengadilan tingkat bawah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya.

Sebagai metode utama dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur yang mencakup kajian terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum, artikel-artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah, serta dinamika yang terjadi dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan teks dari sumber sekunder, tetapi juga melakukan analisis terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang memiliki pengaruh besar terhadap praktik peradilan di tingkat bawah. Peneliti melakukan pemilahan dan analisis terhadap keputusan-keputusan tersebut untuk menemukan pola-pola tertentu terkait dengan bagaimana Mahkamah Agung memberikan arahan hukum dan bagaimana pengadilan tingkat bawah merespons dan menerapkannya dalam putusan mereka.

Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi untuk menilai dan menginterpretasi materi yang diperoleh dari keputusan-keputusan Mahkamah Agung. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keputusan-keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan bagaimana keputusan-keputusan ini diterima dan diadaptasi oleh pengadilan tingkat bawah. Peneliti juga membandingkan penerapan yurisprudensi

oleh pengadilan tingkat bawah dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dengan memperhatikan perbedaan interpretasi yang mungkin muncul dalam kasus yang serupa.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga mencakup wawancara dengan sejumlah hakim dari pengadilan tingkat bawah, untuk memperoleh perspektif langsung dari para pelaku utama dalam penerapan hukum. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali pemahaman hakim terhadap yurisprudensi yang ada dan bagaimana mereka mengimplementasikannya dalam praktik peradilan. Wawancara juga memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pengadilan tingkat bawah dalam menerapkan keputusan-keputusan Mahkamah Agung, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi penerapan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek sistem informasi hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di tingkat bawah. Teknologi informasi yang digunakan untuk mendistribusikan keputusan-keputusan Mahkamah Agung ke seluruh pengadilan di Indonesia menjadi elemen penting dalam memastikan penyelarasan putusan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis sistem informasi yang ada untuk menilai seberapa efektifnya distribusi dan aksesibilitas yurisprudensi bagi hakim di pengadilan tingkat bawah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah. Penelitian ini juga berfokus pada dinamika penerapan yurisprudensi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menyelaraskan putusan antar pengadilan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Penyelarasan Putusan oleh Mahkamah Agung dalam Praktik**

Dalam praktik peradilan Indonesia, Mahkamah Agung memainkan peran vital dalam menjaga keselarasan putusan pengadilan tingkat bawah dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Ningtyas, 2024). Proses penyelarasan ini dimulai dengan pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, tidak hanya mengawasi jalannya kasus kasasi, namun juga berfungsi sebagai pengarah bagi pengadilan tingkat bawah, memastikan bahwa putusan yang diambil konsisten dengan interpretasi hukum yang sudah mapan. Namun, meskipun ada pedoman ini, tidak jarang ditemukan ketidakselarasan antara putusan Mahkamah Agung dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat bawah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap yurisprudensi atau interpretasi hukum yang berbeda terhadap kasus serupa. Salah satu penyebab utama ketidakselarasan adalah adanya faktor subjektif yang dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan (Oktavian et al., 2024), pengalaman, dan kapasitas individu hakim yang berbeda-beda di setiap pengadilan.

Selain itu, sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga menjadi faktor penentu. Mahkamah Agung berupaya untuk meminimalisir perbedaan tersebut dengan memberikan arahan dan pembinaan kepada pengadilan tingkat bawah, baik melalui pelatihan maupun melalui sistem informasi hukum yang lebih mudah diakses. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan arahan tersebut belum selalu berjalan dengan efektif, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya manusia yang terbatas atau di pengadilan yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber informasi hukum terbaru.

Salah satu contoh konkret ketidakselarasan ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan yang melibatkan interpretasi terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia, 1999). Mahkamah Agung dalam beberapa kasus memberikan penafsiran yang lebih luas tentang hak-hak dasar, sementara beberapa pengadilan tingkat bawah cenderung menerapkan interpretasi yang lebih ketat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum

yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan lebih banyak pedoman melalui yurisprudensi yang lebih terperinci. Namun, meskipun sudah ada upaya ini, ketidakpastian hukum tetap terjadi, terutama ketika yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diterima sepenuhnya oleh pengadilan tingkat bawah. Masih banyak pengadilan yang merasa bahwa mereka memiliki otonomi untuk menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan kasus yang mereka hadapi, meskipun hal ini terkadang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung.

Sistem pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap pengadilan-pengadilan tingkat bawah juga memainkan peran penting dalam penyalarsan putusan. Mahkamah Agung memiliki mekanisme untuk mengevaluasi apakah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat bawah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Namun, mekanisme ini belum selalu berjalan dengan optimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Meskipun terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah, belum terintegrasinya sistem antar pengadilan, dan format putusan yang tidak seragam. Selain itu, rendahnya kompetensi teknis aparatur dan terbatasnya akses publik terhadap putusan juga menjadi kendala yang menghambat efektivitas sistem tersebut. Mahkamah Agung terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyalarsan putusan ini dengan melibatkan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi hukum yang lebih efisien dan mudah diakses oleh pengadilan-pengadilan tingkat bawah dapat membantu hakim untuk lebih mudah mengikuti perkembangan yurisprudensi yang relevan. Namun, meskipun teknologi semakin berkembang, tantangan utama tetap terletak pada kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di pengadilan-pengadilan daerah.

Dinamika penyalarsan putusan ini tidak hanya terbatas pada faktor-faktor internal, seperti kualitas hakim dan sistem informasi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial dan politik yang dapat memengaruhi keputusan hakim. Faktor eksternal ini dapat menyebabkan putusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan konsistensi hukum yang diinginkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu terus memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan agar pengadilan tingkat bawah dapat menyalarskan putusannya sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Secara keseluruhan, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah pedoman dan yurisprudensi yang bertujuan untuk menyalarskan putusan pengadilan tingkat bawah, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada. Pembinaan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki proses penyalarsan ini di masa depan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalarsan Putusan**

Penyalarsan putusan antara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas yurisprudensi yang diberikan, tetapi juga oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh hakim. Faktor internal utama yang mempengaruhi adalah kualitas dan kapasitas hakim di pengadilan tingkat bawah. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dengan pengalaman lebih dan pelatihan yang memadai cenderung lebih memahami dan dapat mengimplementasikan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan lebih baik.

Namun, tidak semua hakim di pengadilan tingkat bawah memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai. Beberapa hakim di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep hukum yang lebih rumit, termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan juga mempengaruhi cara hakim menafsirkan hukum dan yurisprudensi yang ada. Hakim dengan latar belakang pendidikan yang lebih kuat dalam teori hukum biasanya lebih mudah menerapkan pedoman Mahkamah Agung, sementara hakim dengan latar belakang yang lebih praktis atau teknis cenderung berfokus pada penyelesaian kasus secara lebih pragmatis.

Faktor kedua yang mempengaruhi penyalarsan putusan adalah sistem informasi hukum yang digunakan oleh pengadilan tingkat bawah. Akses yang terbatas terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan dapat menyebabkan pengadilan tingkat bawah tidak mengetahui pedoman hukum terbaru. Meski Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan akses informasi dengan menggunakan teknologi, kenyataannya masih ada pengadilan yang belum memiliki sarana untuk mengakses keputusan-keputusan tersebut dengan mudah. Ini menyebabkan perbedaan interpretasi hukum yang signifikan antara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah. Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam penyalarsan putusan. Salah satunya adalah tekanan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam beberapa kasus, tekanan dari masyarakat atau media massa dapat mendorong hakim untuk mengambil keputusan yang lebih populis daripada yang sesuai dengan hukum yang ada. Hal ini sering terjadi pada kasus-kasus yang mendapat perhatian publik tinggi, di mana hakim mungkin merasa tertekan untuk memberikan keputusan yang lebih berpihak pada opini publik, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pedoman yurisprudensi yang ada.

Selain itu, pengaruh budaya hukum setempat juga turut mempengaruhi cara hakim menerapkan hukum. Di beberapa daerah, budaya lokal dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi cara hakim menafsirkan norma-norma hukum, yang bisa jadi tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang diatur oleh Mahkamah Agung. Hal ini sering terjadi pada pengadilan tingkat bawah yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya setempat.

Tantangan lainnya terletak pada kurangnya kesadaran akan pentingnya penyalarsan putusan antara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah. Di beberapa pengadilan, terdapat anggapan bahwa Mahkamah Agung hanya berwenang dalam perkara-perkara kasasi, sementara pengadilan tingkat bawah merasa memiliki otonomi penuh dalam memberikan putusan. Padahal, keselarasan antara putusan pengadilan tingkat bawah dan pedoman Mahkamah Agung sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang konsisten dan adil. Dalam hal ini, upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk pengadilan tingkat bawah dapat menjadi solusi penting. Pelatihan yang lebih terstruktur tentang penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat membantu meningkatkan pemahaman hakim terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan cara-cara terbaik dalam mengimplementasikannya dalam praktik peradilan.

Selain pelatihan, Mahkamah Agung juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap implementasi yurisprudensi dengan cara memperkenalkan sistem penilaian yang lebih transparan dan terukur terhadap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat bawah. Sistem ini dapat membantu Mahkamah Agung untuk lebih memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan tingkat bawah dalam menerapkan pedoman hukum yang ada, serta memberikan solusi yang lebih efektif. Secara keseluruhan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyalarsan putusan antara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa penyalarsan putusan dapat terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia.

### **Peran Mahkamah Agung dalam Pembinaan Pengadilan Tingkat Bawah**

Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tingkat bawah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia (Rohmah, 2024). Salah satu cara Mahkamah Agung melaksanakan tugas ini adalah melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada pengadilan tingkat bawah. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pelatihan teknis mengenai prosedur peradilan hingga pemahaman mendalam mengenai yurisprudensi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga mencakup penyuluhan mengenai pentingnya keselarasan putusan antara pengadilan tingkat bawah dengan pedoman hukum yang

sudah ada. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk hakim dan aparat peradilan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengaplikasikan hukum dan yurisprudensi yang berlaku. Melalui pelatihan ini, Mahkamah Agung berharap dapat mengurangi perbedaan interpretasi hukum yang terjadi di tingkat pengadilan. Namun, meskipun upaya pembinaan ini telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar dalam penerapannya. Beberapa pengadilan tingkat bawah, terutama yang berada di daerah dengan akses terbatas, tidak selalu dapat mengikuti pembinaan ini dengan baik. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran sering kali menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan pembinaan yang efektif. Sehingga, meskipun Mahkamah Agung telah mengembangkan berbagai program pelatihan, dampaknya terhadap pengadilan tingkat bawah belum sepenuhnya maksimal.

Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat bawah juga menjadi salah satu bentuk pembinaan. Mahkamah Agung mengawasi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat bawah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Namun, sistem pengawasan ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dalam jumlah personel yang dapat melakukan pengawasan langsung dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk mengevaluasi setiap putusan pengadilan tingkat bawah. Mahkamah Agung juga memperkenalkan sistem informasi hukum yang lebih canggih untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat bawah memiliki akses yang memadai terhadap keputusan-keputusan yang relevan. Dengan adanya sistem informasi ini, pengadilan tingkat bawah diharapkan dapat dengan mudah mengakses putusan-putusan Mahkamah Agung dan menggunakan referensi ini dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penerapan sistem ini juga tidak selalu berjalan mulus, karena pengadilan di daerah-daerah terpencil mungkin belum sepenuhnya memiliki akses terhadap teknologi yang diperlukan.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Agung dalam pembinaan pengadilan tingkat bawah sangat vital dalam menjaga keselarasan putusan dan memastikan penerapan hukum yang konsisten. Namun, pembinaan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik dan memperhatikan berbagai hambatan yang ada di lapangan.

### **Arah Kebijakan Penyelarasan Putusan Pengadilan di Masa Depan**

Penyelarasan putusan pengadilan antara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius di masa depan. Dalam rangka memastikan keberlanjutan keselarasan putusan, Mahkamah Agung perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan kualitas pelatihan bagi hakim, yang tidak hanya berfokus pada teknis prosedural, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang teori hukum dan yurisprudensi yang ada.

Selain itu, kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif perlu menjadi perhatian. Pengawasan yang lebih intensif dan berbasis teknologi akan membantu Mahkamah Agung untuk lebih mudah menilai apakah putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat bawah sesuai dengan pedoman hukum yang ada. Salah satu solusi potensial adalah dengan mengembangkan sistem penilaian otomatis terhadap kesesuaian putusan yang dapat memberikan feedback langsung kepada hakim di pengadilan tingkat bawah. Di samping itu, penguatan sistem informasi hukum menjadi langkah penting dalam penyelarasan putusan. Penyediaan akses informasi yang mudah dan cepat akan memungkinkan hakim untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan situs web yang responsif bisa menjadi sarana yang efektif untuk mencapai hal ini.

Kebijakan lain yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan kerjasama antara Mahkamah Agung dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan hukum untuk melakukan

penelitian dan kajian terkait dengan keselarasan putusan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis pada bukti dan data, serta membantu dalam penyusunan yurisprudensi yang lebih jelas dan mudah diterapkan.

Di masa depan, Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses peradilan, terutama dalam hal akses terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Dengan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, Mahkamah Agung dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang terjadi akibat perbedaan interpretasi hukum antara hakim dan masyarakat. Secara keseluruhan, arah kebijakan penyalarsan putusan pengadilan di masa depan harus lebih terintegrasi dan berbasis pada teknologi serta peningkatan kapasitas hakim di pengadilan tingkat bawah. Dengan adanya kebijakan yang lebih sistematis dan didukung oleh teknologi informasi, diharapkan keselarasan antara putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah dapat tercapai dengan lebih efektif.

## SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikat putusan pengadilan sebagai preseden dalam sistem peradilan Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga konsistensi hukum. Meskipun preseden berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan tingkat bawah dalam mengambil keputusan, penerapannya tidak selalu mudah dan sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, baik dari sisi hukum, teknis, maupun praktik di lapangan. Pertama, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa preseden dapat diterapkan secara konsisten oleh pengadilan di tingkat bawah. Sebagai sumber utama yurisprudensi, Mahkamah Agung harus terus melakukan pembinaan dan memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana preseden harus diterapkan, serta memperhatikan perkembangan zaman yang mempengaruhi pemahaman terhadap hukum.

Kedua, meskipun preseden memiliki kedudukan yang kuat dalam teori hukum, praktik penerapannya masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hakim di tingkat bawah terhadap pentingnya preseden dan adanya perbedaan interpretasi hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi hakim, agar mereka lebih memahami fungsi dan penerapan preseden dalam praktik peradilan. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat menjadi solusi penting untuk mempercepat dan mempermudah akses terhadap putusan Mahkamah Agung serta membantu pengadilan tingkat bawah dalam menerapkan preseden dengan lebih tepat. Dengan adanya sistem yang mendukung kemudahan akses terhadap informasi hukum yang relevan, keselarasan putusan antara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah dapat tercapai dengan lebih efektif. Arah kebijakan penyalarsan putusan pengadilan di masa depan harus mencakup peningkatan kualitas pelatihan hakim, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta kerjasama yang lebih erat antara Mahkamah Agung dan lembaga pendidikan hukum. Hal ini akan memastikan bahwa preseden yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih mendalam dalam aspek teori dan praktik. Dengan pembenahan sistem peradilan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, preseden akan lebih mudah diterapkan, meningkatkan kualitas hukum, dan memberi kontribusi pada keadilan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*,

- 3(1), 11–26. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>
- Gaffar, J. M. (2008). Kedudukan Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(2), 43.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.
- Inkonsistensi, D., & Penggunaan, P. (2024). *Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*. 1.
- Kira, J. H. V. I. S. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1349–1358.
- Laia, L. dodo. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Article*, 1(1), 22–26. Perlindungan Hukum; Hukuman Mati; Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- Ningtyas, W. H. (2024). *Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan)*.
- Oktavian, H., Mustafa, D., & Pananrangi, A. R. (2024). Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Paradigma Journal of Administration*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i1.4600>
- Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 100–131.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 6.